



Perlunya Perubahan Pola Pikir Publik

● Membedah Problem Persampahan di Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Permasalahan sampah di Kota Yogya seakan menjadi momok mengerikan yang tidak kunjung dapat ditaklukkan. Berbagai upaya yang sudah ditempuh Pemkot Yogya pun tidak kunjung memuaskan warga masyarakat yang terus mendesak kata tuntas.

Guru Besar Fakultas Teknik Kimia UGM, Prof Chandra Wahyu Purnomo mengatakan, masalah pertama di Kota Yogya adalah sistem pengelolaan berbasis depo. Masyarakat bisa membawa sampahnya sendiri ke depo-depo itu, sekaligus memungkin warga luar kota ikut nimbung.

"Pengetatan dengan menunjukkan KTP tetap tidak menghindarkan sampah dari daerah lain masuk ke depo. Itu menjadi masalah," katanya, di sela *Focus Group Discussion* (FGD) 'Strategi Komunikasi Publik Tentang Pengelolaan Sampah' di Balai Kota Yogya, Kamis (21/11).

Sialnya, tidak selamanya kuota di depo-depo yang tersebar di seluruh kemantren itu siap untuk menerima pembuangan sampah dari masyarakat. Ketika depo penuh atau berhenti beroperasi karena suatu kendala, muncul titik-titik pembuangan liar yang belakangan marak dikeluhkan.

"Melihat deponya penuh atau sedang tidak beroperasi, masyarakat lantas membuang di sungai atau lokasi-lokasi lain," cetusnya.

Ia menyadari masalah sampah sangat kompleks dan perlu ditekankan peran semua pihak, tidak hanya pemerintah kota saja. Karena itu kalangan swasta, seperti hotel, restoran, bahkan perguruan tinggi di Kota Yogya, seharusnya bisa mengolah sampahnya sendiri.

"Secara akademis, pola ideal itu masyarakat memilah antara organik dan residu. Sampah organik yang bisa terjual, kan ada pengolahnya. Jadi masuk ke sistem pengolahan sampah pemerintah daerah hanya organik yang susah diolah



FGD - Suasana FGD 'Strategi Komunikasi Publik Tentang Pengelolaan Sampah melalui Media Massa/Measos' di Balai Kota Yogya, Kamis (21/11).

dan residu saja," urai Chandra.

Edukasi beralih

Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Ahmad Haryoko menambahkan, edukasi 'buanglah sampah pada tempatnya' sudah tidak relevan. Dengan kondisi sekarang, sampah tidak bisa hanya sekadar dibuang, karena terbukti menimbulkan problem sosial yang sangat serius.

"Edukasinya harus beralih ke 'pilahlah sampah sesuai dengan jenisnya'. Tapi, mengubah pikiran, perilaku dan kebiasaan itu tidak mudah. Ini pekerjaan kita bersama, bahwa kalau perlakuan kita terhadap sampah tidak berubah, ya tidak akan selesai itu masalah," tambah Haryoko.

Dijelaskan, permasalahan sampah di Kota Yogya bermula dari penutupan TPA Piyungan, di mana gonjanganj teras sejak kisaran 2023. Pukulan telak lantas menghantam ketika muncul keputusan pengolahan sampah di DIY harus dilakukan secara desentralisasi, yang akhirnya memicu konflik persampahan, terutama di Kota Yogya.

"Kondisi kita belum siap 100 persen, karena tidak punya lahan, hampir seluruhnya permukiman. Apalagi, menurut UU, tempat pengolahan sampah minimal 500 meter dari permukiman," jelasnya.

Padahal, potensi sampah

harian yang diproduksi di Kota Yogya dan harus diolah mencapai 300 ton, baik jenis organik maupun anorganik. Pihaknya menyiapkan pengolahan di hilir sekitar 200 ton, kemudian yang 100 ton didorong untuk diolah di hulu atau sumbernya.

"Sehingga sosialisasi dan edukasi terus dilakukan terhadap sumber-sumber penghasil sampah. Kita cegah jangan sampai 100 ton masuk ke area pengolahan," terangnya.

Di hilir, Pemkot Yogya menyiapkan unit-unit pengolahan sampah di tiga titik sekaligus di Karangmiri, Nitikan, dan Kranon. Ketiganya menggunakan mesin RDF (*Refused Derived Fuel*), supaya sampah yang diolah tidak sekadar habis, tapi juga menghasilkan nilai ekonomi.

"Kami upayakan ketiga lokasi ini bisa mengolah di atas 100 ton per hari. Nanti, kami juga akan maksimalkan lahan pinjaman di Piyungan," cetusnya.

Terkait retribusi pembuangan sampah di depo yang belakangan ramai dibicarakan, Haryoko menegaskan masih sebatas kajian. Menurutnya, pemerintah ingin menghadirkan rasa keadilan, di mana warga membayar retribusi berdasar volume sampah yang dibuangnya.

"Kalau sampah yang dibuang sedikit, ya bayarnya murah. Tapi kalau buangnya banyak, apalagi tidak dipilah, ya mahal," pungkasnya.

(aka/ord)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005